

ABSTRAK

Hadana Lihadzar Romadhon, NIM 12102173127, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA Pra)*”, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Pembimbing: Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.

Kata kunci : Analisis Kemanfaatan, Pasal 46, Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, Gugatan, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang anak menggugat orang tua mengingat adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan anak berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua dengan anak menggugat orang tua merupakan suatu kontradiksi. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan seorang anak untuk menghormati orang tua serta wajib memelihara jika anak sudah dewasa. Jika berlandaskan kepada salah satu konsep hukum yaitu kemanfaatan yang berdasar kepada nilai moral yang ada, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan rujukan upaya mencegah anak menggugat orang tua. Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Takengon, pada putusan No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan Putusan Pengadilan Agama Praya, pada putusan No. 442/Pdt.G/2020/PA Pra yang mana para pihak dalam perkara tersebut Penggugat adalah Anak dan Tergugat adalah Orang tua. Sehingga dalam praktik peradilannya pula perlu dipertanyakan terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan kemanfaatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3) Untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

Skripsi ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang digunakan peneliti dalam metode pendekatan penelitian ini yaitu metode pendekatan undang-undang (*statue aproach*), dan metode pendekatan kasus (*case aproach*). Teknik pengumpulan data berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisa data kualitatif yaitu data akan diuraikan dengan deskriptif analistis terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sedangkan pada putusan putusan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra

Majelis Hakim sudah tepat dalam memutus sengketa waris, hakim berpegang pada pendapat empat Imam Mazhab yang mengatakan: “*pihak yang menerima wasiat bukan yang terdiri dari ahli waris. Sehingga, wasiat kepada ahli waris tidak sah,*” maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian oleh hakim. 2) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi tentang kewajiban anak kepada orang tuanya, dengan ayat (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam analisis kemanfaatan dimana asas tersebut jika dimasukkan ke dalam Pasal 46 akan menemukan kontradiksi dimana dengan perkara gugatan anak kepada orang tua di dalam putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan putusan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra yang dimana para pihak dalam perkara tersebut adalah anak melawan orang tuanya. 3) Perkara yang telah diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum islam yaitu pada perkara No. 9/Pdt.G/2021/PN.Tkn hakim memutuskan perkara tidak diterima karena ada kecacatan perkara. Sedangkan pada putusan hakim No. 442/Pdt.G/2020/PA.Pra hakim memutuskan bagian yang didapat ahli waris, maka oleh hakim diputuskan menjadi harta waris. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam mengabulkan gugatan dan menghadirkan keadilan bagi para pihak dalam membagi harta peninggalan Pewaris menjadi harta waris berdasarkan ketentuan agama.

ABSTRACT

Hadana Lihadzar Romadhon, NIM 12102173127, “*Analysis of the Judge's Decision on the Lawsuit Children to Parents Reviewed Based on the Benefits of Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law (Case Study of Takengon District Court Decision Number: 9/Pdt.G/2021/PN TKn and Praya Religious Court Decision Number: 442/Pdt.G/2020/PA Pre)*”, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences. Supervisor: Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.

Keywords: Benefit Analysis, Article 46, Law, Number 1 of 1974, Lawsuit, Positive Law, Islamic Law

This research was motivated by a child suing his parents considering that there is a reciprocal relationship between parents and children in the form of rights and obligations that must be fulfilled by both parents to children and children to parents. The obligation of children to their parents with children suing their parents is a contradiction. According to Article 46 of Law Number 1 of 1974, a child is obliged to respect his parents and is obliged to look after them when the child is an adult. If it is based on one of the legal concepts, namely benefit based on existing moral values, Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage can be used as a reference for efforts to prevent children from suing their parents. Like the case that occurred at the Takengon District Court, in decision no. 9/Pdt.G/2021/PN TKn and the Praya Religious Court Decision, in decision no. 442/Pdt.G/2020/PA Pre where the parties in the case, the plaintiff is the child and the defendant is the parent. So in judicial practice it is also necessary to question the legal considerations used by the judge in giving a decision in the case.

The formulation of the problem in this thesis is: 1) What is the analysis of the judge's considerations regarding decision number 9/Pdt.G/2021/PN TKn and number 442/Pdt.G/2020/PA Pra? 2) How is the analysis of the judge's considerations in the judge's decision reviewed based on the usefulness of Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? 3) How is the analysis of the judge's considerations in the judge's decision reviewed based on Islamic Law? The aims of this research are: 1) To analyze the judge's considerations regarding decisions number 9/Pdt.G/2021/PN TKn and number 442/Pdt.G/2020/PA Pra. 2) To analyze the judge's considerations in the judge's decision based on the usefulness of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 3) To analyze the judge's considerations in the judge's decision based on Islamic Law.

This thesis is a type of normative legal research research. The method used by researchers in this research approach is the legal approach method (*statue aproach*), and the case approach method (*case aproach*). The data collection technique is a method used by researchers to collect and explore data, both sourced from primary and secondary data. The data analysis technique uses qualitative data analysis, namely the data will be described using descriptive analysis of primary data and secondary data.

The research results show that: 1) Decision number 9/Pdt.G/2021/PN TKn is based on the legal considerations of the Panel of Judges which stated that the plaintiff's claim was unacceptable (*declared inadmissible*), whereas in the decision number 442/Pdt.G/2020/PA the Pre Panel of Judges was correct in deciding the inheritance dispute, the judge adhered to the opinion of the four Imams of the School of thought

who said: "*the party receiving the will is not the heir. Until then, the will to the heirs is invalid,*" then the plaintiff's lawsuit can be partially granted by the judge. 2) Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage contains the obligations of children to their parents, with paragraph (1) Children are obliged to respect their parents and obey their good wishes and (2) If the child is an adult, he is obliged to look after them according to his abilities, parents and family in a straight line upwards if they need his help. In the analysis of the usefulness of this principle, if it is included in Article 46, there will be a contradiction with the case of a child's lawsuit against their parents in decision number 9/Pdt.G/2021/PN TKn and decision number 442/Pdt.G/2020/PA Pra where the parties in the case are children against their parents. 3) The case that has been decided by the judge is in accordance with Islamic law, namely in case No. 9/Pdt.G/2021/PN.Tkn the judge decided that the case would not be accepted because there were defects in the case. Meanwhile, in judge's decision no. 442/Pdt.G/2020/PA. The judge decides what share the heir gets, then the judge decides it becomes the inheritance. So that the Panel of Judges was correct in granting the lawsuit and providing justice for the parties in dividing the heir's inheritance into inheritance based on religious provisions.

خلاصة

هادانا ليهازار رومادون، نيم 12102173127، "تحليل قرار القاضي في الدعوى مراجعة الأطفال للوالدين بناءً على فوائده المادة 46 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج والشريعة الإسلامية) دراسة حالة لقرار محكمة مقاطعة تاكينجون رقم: Pdt.G/2021/PN TKn 9/وقرار محكمة برايا الدينية رقم: 442، (برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي بكلية الشريعة والعلوم القانونية. المشرف: د. أحمد مصنف، M.H.I.

الكلمات المفتاحية: تحليل المنفعة، المادة 46، قانون رقم 1 لسنة 1974، دعوى، قانون وضعي، الشريعة الإسلامية

كان الدافع لهذا البحث هو قيام الطفل بمقاومة والديه باعتبار أن هناك علاقة متبادلة بين الوالدين والأبناء على شكل حقوق والتزامات يجب الوفاء بها من قبل كلا الوالدين تجاه الأبناء والأبناء تجاه الوالدين. إن التزام الأبناء تجاه والديهم مع قيام الأطفال بمقاومة والديهم هو تناقض. وفقاً للمادة 46 من القانون رقم 1 لسنة 1974، يجب على الطفل احترام والديه والعناية بهما عندما يصبح الطفل بالغاً. إذا كان الأمر مبنياً على أحد المفاهيم القانونية، أي المنفعة القائمة على القيم الأخلاقية القائمة، فيمكن استخدام المادة 46 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج كمرجع للجهود المبذولة لمنع الأطفال من مقاضاة والديهم. مثل القضية التي حدثت في محكمة مقاطعة تاكينجون، في القرار رقم. Pdt.G/2021/PN TKn 9/وقرار محكمة برايا الدينية، في القرار رقم. Pdt.G/2020/PA 442/قبل أن يكون طرفاً القضية المدعي هو الطفل والمدعى عليه هو الوالد. لذلك، في الممارسة القضائية، من الضروري أيضاً التشكيك في الاعتبارات القانونية التي يستخدمها القاضي في إصدار قرار في القضية.

صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي: (1) ما هو تحليل اعتبارات القاضي فيما يتعلق بالقرار رقم Pdt.G/2021/PN TKn 9/ورقم Pdt.G/2020/PA Pra442؟ (2) كيف تتم مراجعة تحليل اعتبارات القاضي في قرار القاضي على أساس مدى فائدة المادة 46 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج؟ (3) كيف تتم مراجعة تحليل اعتبارات القاضي في قرار القاضي على أساس الشريعة الإسلامية؟ أهداف هذا البحث هي: (1) تحليل اعتبارات القاضي فيما يتعلق بالقرارين رقم Pdt.G/2021/PN TKn 9/ورقم Pdt.G/2020/PA Pra. 2) 442/تحليل اعتبارات القاضي في قرار القاضي بناءً على فائدة القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. (3) تحليل اعتبارات القاضي في حكم القاضي على أساس الشريعة الإسلامية.

تعد هذه الأطروحة نوعاً من أنواع البحث القانوني المعياري، والطريقة التي يستخدمها الباحثون في هذا البحث هي طريقة المنهج القانوني) نهج التمثال(، وطريقة منهج الحالة) نهج القضية.(تقنية جمع البيانات هي طريقة يستخدمها الباحثون لجمع واستكشاف البيانات سواء مصدرها البيانات الأولية والثانوية، وتستخدم تقنية تحليل البيانات تحليل البيانات النوعية، أي سيتم وصف البيانات باستخدام التحليل الوصفي للبيانات الأولية والبيانات الثانوية.

تظهر نتائج البحث أن: (1) القرار رقم Pdt.G/2021/PN TKn 9/يستند إلى الاعتبارات القانونية للجنة القضاة التي نصت على أن ادعاء المدعي غير مقبول(أعلن غير مقبول) بينما في القرار رقم Pdt.G/2020/PA 442/كانت هيئة القضاة على حق في الفصل في النزاع على الميراث، فقد تمسك القاضي برأي أئمة المذهب الأربعة الذين قالوا: "الطرف الذي يتلقى الوصية ليس الوريث. وحتى ذلك الحين تكون الوصية للورثة باطلة"، فيمكن للقاضي أن يمنح دعوى المدعي جزئياً. (2) تحتوي المادة 46 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على التزامات الأطفال تجاه والديهم، مع الفقرة (1) يلتزم الأطفال باحترام والديهم وإطاعة رغباتهم الطيبة و (2) إذا كان الطفل بالغاً، فهو ملزم برعايتهم حسب قدراته، ووالديه وعائلته في خط مستقيم إلى الأعلى إذا كانوا بحاجة إلى مساعدته. وفي تحليل فائدة هذا المبدأ، إذا تم إدراجه في المادة 46، فسيكون هناك تناقض مع قضية دعوى الطفل ضد والديه في القرار رقم Pdt.G/2021/PN TKn 9/والقرار رقم Pdt.G/2020/PA 442/برا حيث أطراف القضية هم أطفال ضد والديهم. (3) أن تكون

الدعوى التي حكم فيها القاضي مطابقة للشريعة الإسلامية، وتحديدأ في القضية رقم 1131. 9 Pdt.G/2021/PN.Tkn/قرر القاضي عدم قبول الدعوى لوجود عيوب في الدعوى. وفي الوقت نفسه، في قرار القاضي رقم. Pdt.G/2020/PA 442/القاضي هو الذي يقرر الحصة التي يحصل عليها الوريث، ثم يقرر القاضي أنها تصبح الميراث. وبذلك كانت هيئة القضاة على حق في حكم الدعوى وتحقيق العدالة للطرفين في تقسيم ميراث الوارث إلى ميراث على أساس الأحكام الشرعية.